

Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik
(Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah
di Wilayah Surabaya)

Oleh :

Anton Yuliono

Alumni Program Magister Administrasi
Pascasarjana – Untag Surabaya

ABSTRACT

The high society who do not use their right to vote, this is proof that the public has no confidence in political parties. This study aimed to: Analyze the level of public confidence in political parties with a tendency for people not to use their voting rights in the election of regional heads and deputy heads of regional and analyze resources and affect the high thrust people do not use the right to vote in local elections and deputy head. The subjects were the informants fieldwork which includes members of the Commission, political parties, community leaders and the public in the West Surabaya. Further analysis of studies using qualitative descriptive approach. The first findings, suggesting that the level of public trust in Surabaya on political parties is relatively low, this is reflected in the increasing trend of people who are not using the right to vote on the election for the head of the provincial and district levels in the city of Surabaya. Secondly, resources and barriers that affect the high encourage people not to use their voting rights in local elections at the provincial and municipal levels, is strongly influenced by the high level of corruption of the political actors, political system factors, lack of public confidence in the political parties, and attitudes public apathy towards elections provincial and municipal levels.

Keywords: *Faith Communities, Political Parties and not vot*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala daerah secara langsung akan menjadi medan pembuktian bagi partai politik untuk menunjukkan performa yang bagus untuk mendorong sifat rasionalitas pemilih menuju budaya politik demokratis, dan semoga kelak parpol bisa mengarahkan pemilih pada pertimbangan rasional, seperti kualifikasi *track record*, kapabilitas, dan program calon kepala daerah, dan tidak lagi partai politik primordial yang mendorong masyarakat memilih karena atas pertimbangan hubungan agama, suku, dan kesamaan budaya.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan partai politik, dalam rangka penguatan peran partai politik dalam kaitannya dengan Pemilihan kepala daerah secara langsung antara lain: Pertama, hal yang mendasar yang harus dilakukan adalah perubahan paradigma, khu-

susnya menyangkut peran partai politik dalam Pemilihan kepala daerah. Partai politik harus melihat pemilihan kepala daerah secara langsung bukan semata-mata masalah proyeksi kekuasaan; berapa jabatan kepala atau wakil kepala daerah yang akan diperoleh; berapa dana yang akan disetor oleh kepala daerah yang didukungnya untuk Pemilu yang akan datang. Adalah wajar jika partai politik melakukan perhitungan tentang seberapa populer dan seberapa besar peluang calon yang mereka dukung atau tentang berapa daerah yang mereka targetkan untuk dimenangkan serta cara mencapainya. Akan tetapi, dengan kembali pada latar belakang mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan, maka partai politik seharusnya dapat melepaskan diri dari cara pandang miopis yang menjebak dalam persoalan yang begitu pragmatis dan sempit.

Partai politik harus mampu melihat dalam frame lebih luas bahwa Pemilihan kepala daerah langsung adalah bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kompetisi yang fair dan hadirnya calon-calon yang berkualitas akan melahirkan pemerintahan daerah yang baik dan pada akhirnya akan memupuk kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan peran partai politik di dalamnya. Kedua, partai politik harus bersungguh-sungguh berusaha menawarkan pasangan calon terbaik, yaitu calon yang memiliki kapabilitas sekaligus integritas kepemimpinan. Pertimbangan pencalonan bukan semata-mata popularitas atau modal yang dimilikinya, meskipun keduanya memang penting dan tidak dapat diabaikan untuk mobilisasi perolehan suara. Namun, dengan orientasi politik jangka panjang, partai politik seharusnya mempertimbangkan dengan sangat serius kesesuaian visi, misi, dan program calon dengan platform partai, karena kinerja calon sebenarnya merupakan representatif partai politik dalam mengejawantahkan *blueprint* mereka tentang pemerintahan.

Ketiga, peran partai politik dalam memobilisasi dukungan harus mendewasakan pemilihan melalui pilihan isu dan cara yang bijak, terutama terkait dengan kemungkinan konflik di tengah masyarakat. Masing-masing daerah mempunyai karakteristik tersendiri dan partai harus cerdas memilah mana yang layak dan tidak untuk ditawarkan kepada pemilih. Masih adanya partai-partai politik yang menggunakan cara-cara yang dilarang dalam aturan penyelenggaraan pemilihan umum mendorong semakin meningkatnya pemilih yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau biasa dikenal dengan istilah golongan putih (Golput).

Masyarakat tidak menggunakan hak pilih, merupakan *trend* politik di Indonesia akhir-akhir ini, berbagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden memperlihatkan tingkat golput yang cukup tinggi, antara 35% - 45% terutama pemilihan kepala daerah yang baru berlangsung, yakni pilkada di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumut, dan Jawa Timur. Tingginya angka golongan putih dijadikan bahan perde-

batan di berbagai ruang-ruang diskusi dan debat di TV, dan halaman-halaman media massa. Selain itu, ada berbagai seruan “golput” kepada seluruh rakyat yang dilancarkan oleh kaum pergerakan, terutama organisasi-organisasi massa yang selama ini memenuhi jalan-jalan untuk melancarkan protes kepada pemerintah (Rudi Hartono. [http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji keseriusan-golput.html](http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji_keseriusan-golput.html).)

Senada dengan hasil penelitian di atas, pendapat Menurut Hariyadi (dalam detik-surabaya.com/3/6/2010), Tingginya angka golput mencapai 60 persen dalam Pilwali Surabaya menunjukkan peraturan KPU kurang tegas. Selain itu KPU dinilai kurang optimal meyakinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Angka suara yang tidak digunakan oleh masyarakat Surabaya mencapai sekitar 60 persen atau yang tertinggi bila dibandingkan sejak Pilwali 2005, pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Tingginya angka salah satu unsur pendukungnya adalah institusi pemerintahan dan penyelenggara pemilihan.

Masyarakat tidak menggunakan hak pilih menjadi fenomena baru dan bentuk pelepasan atas penatnya persoalan politik dan ekonomi yang tak sanggup di atasi oleh pemerintah. Tidak sedikit pula dari kaum intelektual dan kelompok gerakan sosial yang menyambut hal ini agak berlebihan. Ibarat reporter siaran sepak bola di Indonesia, ketika mengomentari sebuah pertandingan Liga Jarum Super, potensi gol yang masih jauh kemudian dibesarkan seolah-olah sudah nyaris terjadi gol ([http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji keseriusan-golput.html](http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji_keseriusan-golput.html).)

Golongan putih cenderung meningkat bersamaan dengan memburuknya kondisi perekonomian, ketidakmampuan pemerintah mengatasi korupsi dan persoalan-persoalan sosial-politik, serta pengkhianatan partai-partai hasil pemilihan umum 2004 maupun 2009 terhadap janji-janji perubahan yang dulu mereka dengungkan. Melihat kecenderungan ini, maka memang ada pengaruh antara meningkatnya golongan putih dengan rendahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah atas kegagalan pembangunan ekonomi dan penyelesaian problem sosial, politik dan budaya. Tetapi sebesar

apapun kuantitas mereka, apakah di antara 40-50 % itu bulat-bulat merupakan suara mereka, ataukah hanya merupakan entitas paling kecil (5%, 10%).

Ada juga apatisisme yang lahir dari pikiran sempit tidak mau ikut campur politik dalam bentuk apapun; ketiga, golongan putih juga karena problem politik, seperti karena partai yang dijagokannya tidak lolos atau tidak ada satupun kandidat yang menurutnya layak mewakili aspirasinya. Konflik dikalangan partai yang biasanya berakhir dualisme kepemimpinan. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyetujui satu kepemimpinan, maka kepemimpinan yang kalah dalam proses hukum biasanya mengambil jalan golongan putih sebagai bentuk pembangkangan atau bentuk kesesalan; dan keempat, golongan putih dilakukan karena tidak percaya lagi dengan mekanisme prosedur ataupun bentuk demokrasi liberal pada umumnya. Tidak seperti bentuk apatisisme, kelompok idiologis ini bersifat aktif dalam mendorong kelahiran bentuk demokrasi atau system politik yang baru. Mereka terus menerus berkreasi, menyusun dan mempraktekkan hipotesis, yang merupakan bentuk demokrasi baru, semacam demokrasi tandingan, yang akan mengakhiri petualangan demokrasi ([http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji keseriusan-golput.html](http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji_keseriusan_golput.html).)

Prediksi akan bertambah golongan putih pada pemilihan umum 2014 didasarkan proses pengamatan pandangan politik rakyat Indonesia. Saat ini gejala bertambahnya apatisisme rakyat terhadap kehidupan politik dan menguatnya gerakan golongan putih tampak semakin bertambah. Bahkan gerakan mahasiswa yang selalu diposisikan sebagai gerakan ekstraparlementer, gerakan moral yang mengekspresikan kepentingan rakyat, dianggap menjadi salah satu kelompok sosial yang paling rentan dengan sikap golongan putih. Jika benar, maka boleh dikatakan signifikan jumlah golongan putih dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap partai dalam pemilihan umum mendatang akan terus meningkat (jurnal online arahkiri2009.blogspot.com).

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, baik eksekutif, birokrasi, lembaga peradilan, lembaga perwakilan maupun partai politik adalah sebuah hambatan besar bagi perkembangan demokrasi. Rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik yang ada adalah sebuah kondisi yang membahayakan bagi masa depan demokratisasi. Bagaimanapun, sebuah rezim demokrasi terkonsolidasi hanya jika mayoritas publik, meskipun dalam keadaan sulit atau krisis, tetap pada keyakinan bahwa prosedur dan lembaga demokratis merupakan jalan yang paling tepat untuk mengatur kehidupan bersama serta dukungan publik terhadap alternatif-alternatif non demokratis sangat kecil.

Hasil penelitian di atas didukung oleh hasil survei yang dilakukan *Centre for strategic and International Studies* (CSIS) menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah, hanya 22,4 persen responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik, sisanya menilai sebaliknya. Dukungan terhadap partai politik turun dibandingkan dengan pemilu 2009. hal tersebut dikarenakan saat ini partai politik bukanlah institusi yang menjadi saluran buat aspirasi publik ke pemerintah, tetapi partai politik lebih menjadi alat buat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaan dan menguasai sumber daya alam yang ada. Survei ini dilakukan secara acak bertingkat pada 16 hingga 24 Januari 2012 terhadap 2117 responden di 33 provinsi. Semua partai mengalami penurunan dari pemilu 2009 karena pemilih secara umum kecewa terhadap semua partai politik dan cenderung bingung untuk memberikan dukungannya," kata peneliti CSIS, Sunny Tanuwidjaja (2012), ketika memaparkan hasil survei CSIS tentang politik nasional 2012 di Jakarta.

Permasalahannya tinggi atau rendahnya golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada di Surabaya sangat terkait atau ada korelasinya dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar suatu wacana jika tidak diikuti oleh penelitian yang membuktikan kesimpulan tersebut. Belum adanya penelitian untuk mendasari kesimpulan

di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang kepercayaan masyarakat pada partai politik terhadap kecenderungan tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan datang.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan kecenderungan tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah?
- b. Faktor-faktor sumber daya dan daya dorong yang mempengaruhi perilaku masyarakat tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah?

METODE

Fokus Penelitian

Sebagaimana di atas maka fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut: mengamati sikap dan disposisi pemilih dalam menentukan pilihan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kota dan mengamati sumber daya pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingginya masyarakat tidak menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kota. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, bahwa analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Didalam penelitian ini, kesimpulan umum bisa berupa kategorisasi. Seperti kategori pemilihan kepala daerah yang berhasil, misalnya mampu menurunkan angka golput atau tidak menggunakan hak pilih, dan kategori pemilihan kepala daerah yang gagal, misalnya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih tinggi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis interaktif* (Miles dan Huberman, 1994).

Hasil Analisis Penelitian

Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik dengan Kecenderungan Tidak Menggunakan Hak Pilih

Berdasarkan wawancara secara mendalam dengan para informan dapat diketahui bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai politik relatif rendah. Karena semua partai politik yang pernah dan masih berkesempatan memimpin rakyatnya dalam pemerintahan Negara gagal memberikan kepercayaan terhadap pemilihnya yaitu rakyat. Terbukti mulai dari PDI Perjuangan, Partai Golkar hingga Partai Demokrat dipercaya rakyat, harus akui bahwa partai-partai politik belum benar-benar berhasil mengemban tanggung jawab yang harus dipikulnya. Kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial hingga keamanan yang harus diberikan rakyatnya belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Hasil penelitian di atas didukung oleh hasil survei yang dilakukan *Centre for strategic and International Studies* (CSIS) menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah, hanya 22,4 persen responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik, sisanya menilai sebaliknya. Dukungan terhadap partai politik turun dibandingkan dengan pemilu 2009. hal tersebut dikarenakan saat ini partai politik bukanlah institusi yang menjadi saluran buat aspirasi publik ke pemerintah, tetapi partai politik lebih menjadi alat buat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaan dan menguasai sumber daya alam yang ada. Survei ini dilakukan secara acak bertingkat pada 16 hingga 24 Januari 2012 terhadap 2117 responden di 33 provinsi. Semua partai mengalami penurunan dari pemilu 2009 karena pemilih secara umum kecewa terhadap semua partai politik dan cenderung bingung untuk memberikan dukungannya," kata peneliti CSIS, Sunny Tanuwidjaja (2012), ketika memaparkan hasil survei CSIS tentang politik nasional 2012 di Jakarta, Senin, Tgl. 12 Pebruari 2012.

Menurut Hariyadi (dalam *detiksurabaya.com/3/6/2010*), Tingginya angka golput mencapai 60 persen dalam Pilwali Surabaya menunjukkan peraturan KPU kurang tegas.

Selain itu KPU dinilai kurang optimal meyakinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Angka suara yang tidak digunakan oleh masyarakat Surabaya mencapai sekitar 60 persen atau yang tertinggi bila dibandingkan sejak Pilwali 2005, Pilgub Jatim hingga Pilpres. Tingginya angka salah satu unsur pendukungnya adalah institusi pemerintahan dan penyelenggara pemilihan.

Dalam konteks ini kecenderungan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang dapat dipahami argumennya, yaitu sebagai kritik atas kondisi politik yang ada. Sikap anti masyarakat terhadap Parpol merupakan wujud publik masih bersikap kritis dan mekanisme kontrol masyarakat masih berjalan. Sikap itu juga sebuah kemajuan untuk melihat dan mengoreksi Parpol. Kekuasaan itu bukan blanko kosong, sebetulnya kontrol masyarakat itu bukan hanya ada di balik pemilihan tetapi justru sesudah pemilihan. Justru pemilih harus terus mencurigai penguasa dengan kekuasaannya apakah masih sesuai janji-janjinya saat kampanye, atau sudah melenceng. Memburuknya penilaian publik terhadap Parpol tak lepas dari perilaku elite Parpol sendiri. Jika kepercayaan pada parpol semakin luntur, maka akan merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Maka saat ini kita harus mulai menggeser paradigma dalam melihat golput dan partisipasi politik dalam konteks demokrasi di atas mutlak diperlukan agar pemilu mendatang tidak lagi hanya demokrasi prosedural semata. Lebih jauh dari itu substansi untuk targetan membangun demokrasi secara utuh yang mestinya dipertimbangkan. Melarang golput justru akan memandulkan dinamika politik yang ada. Sebab ia merupakan bagian untuk mempresentasikan aspirasi politiknya. Negara tentu tidak boleh menjadikannya sebagai suatu yang merugikan atau bahkan dianggap sebagai penyakit yang harus diberantas.

Prediksi pemilu 2014, hasil survei CSIS menyatakan bahwa akan semakin banyak pemilih golongan putih (golput) karena tak percaya pada partai politik. Masyarakat lebih memilih golput karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dikhawatirkan akan menimbulkan potensi instabilitas

sosial politik yang ada. Sikap anti masyarakat terhadap Parpol merupakan wujud publik masih bersikap kritis dan mekanisme kontrol masyarakat masih berjalan. Sikap itu juga sebuah kemajuan untuk melihat dan mengoreksi Parpol.

Dalam perspektif demokrasi, ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Bagaimana mau memperkuat demokrasi, kalau orang yang punya hak politik tidak mau menggunakan haknya itu dengan sungguh-sungguh. Sebuah negara tak bisa hidup tanpa partai politik. Oleh karena itu, parpol harus membenahi diri dan programnya sehingga memunculkan kembali kepercayaan rakyat. Penguatan parpol ini sangat penting karena parpol adalah pilar demokrasi.

Menurut penulis, tidak ada sistem demokrasi yang betul-betul efektif jika tidak menggunakan parpol. Kompleksitas permasalahan negara begitu besar dan hanya akan bisa diatasi secara politik melalui perwakilan, dan perwakilan itu parpol. Parpol harus membuat masyarakat tertarik lagi. Kalau parpol tidak dipercaya lagi, harus ditanyakan buat apa parpol didirikan. Menurut penulis parpol itu sebuah sarana, tak peduli siapa yang duduk didalamnya, yang penting integritas dari moralitas parpol itu sendiri. Kecenderungan partai politik justru sebagai tempat untuk mencari "makan" yang kemudian memicu fenomena politik uang di tengah biaya politik yang tinggi. Kalau masyarakat sudah apatis, itu sudah berbahaya. Kecenderungan masyarakat ini bisa frustrasi, tidak percaya lagi dengan sistem yang ada, dan tidak mau berpartisipasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam system politik di suatu Negara. Terlebih pada proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik berperan sangat besar, mengingat adanya keterlibatan partai politik di dalam eksekutif, legislative, dan dalam mekanismenya sendiri, yaitu melalui lobby-lobby politik.

Untuk mengatasi pemasalahan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih (golput) di perlukan langkah-langkah yang nyata dari pemerintah. Fenomena penurunan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap parpol harus segera di atasi. Parpol harus kembali pada fungsi awal parpol, parpol harus kembali pada kodratnya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan apa yang menjadi input dari masyarakat. Parpol bukan hanya sekedar alat penggerak dukungan masyarakat untuk legitimasi kekuasaan tapi juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Untuk itu partai politik perlu melaksanakan fungsinya dengan benar dan tepat, yang meliputi: fungsi agregasi, fungsi artikulasi, fungsi edukasi dan fungsi rekrutmen.

1. Fungsi Agregasi

Agregasi merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen.

Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artikulasi kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi individu-individu yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi agregasi kepentingan. Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah suatu penyampaian pendapat yang dilakukan oleh seorang atau banyak orang dan pendapat itu telah dijadikan suatu kebijaksanaan atau singkatnya pemerintah mau mendengarkan dan menuruti pendapat dari kalangan dibawahnya.

2. Fungsi Artikulasi

Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

Kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak swasta (masyarakat sendiri) maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah, yang perlu diperhatikan di dalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau kelompok-kelompok di dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.

Seperti disebut diatas bahwa artikulasi kepentingan itu dilakukan oleh interest group. Interest group pada awalnya menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat. Kemudian kelompok-kelompok kepentingan itu membuat rumusan untuk kepentingan-kepentingan tersebut. Kemudian disampaikan kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah kebijaksanaan, dan diharapkan akan memperoleh tanggapan yang mungkin sekali dapat berwujud sebuah kebijaksanaan yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Jadi dapat disimpulkan artikulasi kepentingan

adalah suatu pendapat yang disampaikan oleh seseorang atau banyak orang kepada pihak pemerintah namun tidak dijadikan suatu kebijaksanaan.

3. Fungsi Edukasi

Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggung-jawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan edukasi, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain atau cara yang ditempuh misalnya dengan memberi penerangan atau agitasi menyangkut kebijakan negara serta menjelaskan arah mana yang diinginkan partai agar masyarakat turut terlibat perjuangan politik partai. Untuk itu dibutuhkan lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan *feedback* berupa dukungan masyarakat luas.

Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerlukan informasi minimal tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara. Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan

publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu, yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik.

4. Fungsi Rekrutmen

Fungsi rekrutmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal : menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Sukarna (1990:34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelanggengan partai politik.

Proses rekrutmen dari parpol harus betul-betul diperbaiki, caranya, seleksinya. Jangan sembarang orang saja yang direkrut. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya jangan dipilih oleh parpol. Jadikan proses seleksi anggota parpol seperti bis sekolah. Jadi, jelas orangnya terdaftar, dididik. Jangan sampai orang-orang yang tidak profesional atau kompetensi dimasukkan dalam rekrutmen anggota parpol dan rekrutmen anggota dewan. Hanya dipilih karena uangnya banyak dan berpengaruh, tanpa memperhatikan moralnya. Jika itu yang terjadi, maka akan terjadi lagi suatu lingkaran dimana orang-orang yang tidak memenuhi kriteria itu juga akan 'memainkan' pemilihan anggota-anggota yudikatif. Harus tetap dengan prosedur-prosedur yang benar. Intinya, calon yang bersangkutan itu punya kejelasan visi, tahu apa tugas yang akan diembannya, dan bagaimana langkah-langkahnya. Selain itu, dia harus punya keahlian dan

keberanian. Dia juga harus punya moral yang bagus dan mampu berkomunikasi.

Menurut penulis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perlu konsistensi. Fungsi merekrut orang untuk duduk sebagai wakil rakyat dan mempromosikan orang untuk menjadi pemimpin itu harus dijalankan dengan benar, namun yang dilakukan selama ini justru penyimpangan dan penyalahgunaan. Untuk itu, agar adanya perbaikan tingkah laku para politisi dan menjalankan fungsinya dengan benar. Untuk itu diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada partai politik agar mampu menumbuhkan pencitraan, dengan tindakan nyata untuk mensejahterakan rakyat, dengan mensejahterakan rakyat, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, maka tidak mustahil untuk periode berikut rakyatlah yang akan mengusung untuk tetap menjadi pemimpinnya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum

Golput adalah singkatan dari Golongan Putih yaitu orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses Pemilihan Umum, baik karena sengaja maupun karena penyebab lainnya. Menurut Surbakti (2004), menegaskan bahwa pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Golput harus dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik. Dengan pengkategorian seperti ini, tentu lebih sulit menelaah seberapa banyak pemilih yang secara sadar memilih menjadi golput. Dengan demikian, penghitungan mengenai jumlah golput riil pun akan semakin sulit dilakukan (Kompas, 10 Mei 2004). Merujuk pendapat Arbi Sanit (1992) golput dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak

suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan para informan dapat diketahui bahwa factor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya Golput pada pemilihan umum di sebabkan oleh Korupsi Aktor-Aktor Politik, sosialisasi,

1. Korupsi Aktor-Aktor Politik

Korupsi telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa dan negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasannya pun terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih (*sophisticated*). Korupsi mempunyai banyak segi dan dapat dipandang dari segi politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Korupsi yang melanda negara Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) serta menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan membahayakan keberadaan negara. Hal ini terjadi karena perilaku korupsi merusak berbagai macam tatanan, seperti tatanan hukum, tatanan politik, dan tatanan sosial budaya dari negara yang bersangkutan.

Kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor politik menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap partai menurun, Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan

karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Faktor Sosial-Ekonomi

Sebagian besar para nonvoter berlatar belakang pendidikan memadai. Pendidikan tinggi cenderung aktif berpolitik, sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah cenderung pasif. Tapi pada kenyataannya justru kalangan terdidik yang membuat terobosan mengkampanyekan golput. Hal ini, karena kalangan terdidik, menyadari tugas dan peran yang harus dimainkan, apalagi dirinya terlanjur menerima label pembela hak-hak sipil.

Hubungan tingkat pendidikan dengan kehadiran memilih memang menunjukkan hubungan yang erat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki, maka memungkinkan seseorang bersifat kritis. Mereka juga mengetahui praktek-praktek politik dan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan, kejujuran, kebebasan dan demokrasi. Pengetahuan semacam inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan untuk tidak memilih. Pendidikan yang tinggi memberikan respon yang kreatif terhadap beberapa fenomena politik yang muncul di tengah kehidupan masyarakat ketimbang masyarakat yang tidak terlalu baik tingkat pendidikannya.

Dalam konteks demikian, pendidikan berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Selain tingkat pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama dan keadaan ekonomi, turut mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih pada saat pemilu. Artinya keadaan ekonomi, agama dan kelas sosial pemilih dapat menjadi alasan golput. Selama ini, ekonomi rendah, pekerja yang penghasilannya pas-pasan, cenderung tidak hadir ke tempat pemungutan suara dengan pertimbangan hari-hari mereka lebih dipentingkan mencari nafkah. Bagi kelompok ini, golput bukan persoalan berani atau tidak berani menampilkan kelainan sikap politik, namun semata-mata faktor kebutuhan yang terlampau

besar bila dibandingkan dengan kebutuhan politik.

Di era reformasi, golput tak selalu berasal dari ekonomi rendah, kalangan borjuis pun juga ambil bagian. Penghasilan yang cukup atau bahkan lebih dari sekedar cukup tak jaminan berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Kalangan borjuis tak terlalu peduli dengan politik, kecuali terdapat suatu kepentingan tertentu. Karena itu, waktu bagi mereka difungsikan untuk bekerja dan istirahat di hari libur seperti pemilu. Fenomena ini menunjukkan tidak adanya motivasi yang diakibatkan dari fenomena politik yang membosankan.

3. Faktor Sistem Politik

Konsep sistem tidak semata dalam pengertian prosedur dan aturan main, tetapi lebih mengarah pada kebijakan pemerintah dan kinerjanya dalam merealisasikan berbagai menu kebijakan. Umumnya pendukung golput melihat sistem politik yang sedang dikembangkan rejim penguasa orde baru dan orde reformasi tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun massa.

Wajar bila masyarakat tak mau hadir ketempat pemungutan suara. Karena tak ada lagi kepercayaan atas sistem politik demikian. Partisipasai masyarakat akan tinggi bila pilar dan prinsip demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, sebaliknya partisipasi masyarakat akan menurun bila seluruh prinsip demokrasi dikhianati.

4. Faktor Rendahnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

Ketidak hadiran pemilih pada pesta demokrasi mesti memiliki pesan politik, setidaknya bentuk kejenuhan. Salah satu makna pesan tersebut adalah rasa apatis atau tidak percaya terhadap hal-hal yang berbau politik. Ketidakpercayaan rakyat sebagai potret buram perpolitikan nasional. Sebab, tidak mungkin rakyat memberikan respon sebegitu sinis, jika hanya persoalan kecil, kekecewaan yang begitu besar disebabkan oleh hal-hal kecil yang terulang-ulang.

Hasil temuan penelitian Dwijayanto mengatakan mayoritas responden (67%) menganggap bahwa dengan dilaksanakannya Pilgub ini tidak akan membawa perubahan apapun baik terhadap provinsi maupun kehidupan mereka. Menurut mereka perhelatan semacam Pilgub ini hanyalah sebuah rutinitas politik saja tanpa menjanjikan suatu perubahan yang berarti.

Senada hasil penelitian di atas, hasil penelitian Aldila Wikan (2010) menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Golput (Tidak Memilih) Dalam Pemilihan Walikota Kota Semarang 2010, yaitu kurangnya sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pemilihan umum, apatisme masyarakat yang timbul akibat kejenuhan terhadap perilaku elit politik dan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang sebuah pemilihan umum, dalam hal ini pemilihan Walikota Semarang 2010, hanya bersifat simbolis.

Berikutnya penelitian Silalahi, Hariman (2011), mengatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya golput dilatar belakangi sosial ekonomi seperti pekerjaan, keluarga dan pendidikan sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat Kecamatan Tarutung dalam hal tidak ikut memilih pada saat pemilihan berlangsung dan masyarakat Kecamatan Tarutung tidak percaya Pemilu dapat memperbaiki keadaan Ekonomi masyarakat Kecamatan Tarutung. Factor nilai budaya berupa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun.

Faktor-faktor tingginya golongan putih dalam pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Seperti diungkapkan Surbakti (1992: 145), salah satunya yakni perilaku memilih didasari oleh lima pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Struktural, pendekatan ini melihat perilaku memilih sebagai hasil dari bentuk sosial yang luas cakupannya. Seperti jumlah partai, kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat, sistem kepartaian, program kerja atau visi maupun misi yang diusung oleh partai, yang semuanya ini tentunya berbeda antara satu

negara dengan negara lainnya disebabkan karena adanya perbedaan basis sosial yang ada di masyarakat, (2) Pendekatan Sosial, yang cenderung menempatkan dan menghubungkan kegiatan memilih dalam konteks sosial. Seperti latar belakang kependudukan dan sosial ekonomi, gender, wilayah bermukim, profesi, pendidikan, status sosial, tingkat pendapatan, serta agama. Kesemuanya itu dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan perilaku memilih seseorang.

Tingginya angka golput di pilkada Surabaya disebabkan karena, *pertama* masyarakat bosan dengan rutinitas pemilihan. Hampir tiap tahun masyarakat melakukan pemilihan, mulai dari pemilihan Gubernur tahun 2008, pemilihan legislatif dan presiden tahun 2009 dan tahun 2010 pemilihan walikota dan wakil walikota. *Kedua*, tidak adanya calon alternatif. Masyarakat disodorkan dengan muka-muka lama yang sudah terbukti kurang bisa mengatasi problematika di Surabaya seperti penciptaan lapangan kerja baru, penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur. *Ketiga*, program yang ditawarkan para kandidat kurang menarik dan cenderung global (tidak terukur). *Keempat*, masyarakat lebih memilih melakukan aktivitas lain seperti bekerja atau liburan, karena secara nyata memberikan penghasilan. Diliburkannya saat pencoblosan tidak berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi meningkat. *Kelima*, perpindahan TPS dan kurangnya TPS khusus. Pada pilkada 2005, TPS khusus tersebar di 17 kecamatan dan berjumlah 27 TPS.

Realitanya melihat konteks masyarakat Surabaya di pilkada yang lalu, faktor yang sangat mempengaruhi tingginya golput atau tidak menggunakan hak pilih dikarenakan tidak adanya penerimaan perangsang politik. Perangsang politik ini merupakan salah satu faktor yang memang sebagai bentuk *rational choice* masyarakat. Ketika ketertarikan masyarakat rendah untuk berpartisipasi, perangsang politik yang diharapkan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang memilih atas dasar rasionalitas ekonomi. Perangsang politik dalam hal ini bukan *money politic* yang diberikan sebelum pencoblosan. Perangsang

politik ini diberikan untuk operasionalisasi dari mesin politik dan untuk *maintenance* konstituen. Jika hal ini tidak dilakukan jangan harap mesin politik (koalisi partai) dan konstituen bisa berjalan.

Secara teknis mungkin banyak di ketahui di media massa bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat undangan dari PPS, dan lain-lain. Faktor-faktor yang di sebut sebelumnya mungkin di sebabkan karena sistem atau penyelenggara pemilu. Faktor selanjutnya adalah faktor individu dengan alasan malas dan tidak memiliki calon yang memenuhi kriteria atau bisa mewakili kepentingannya, dsb. Banyaknya alasan orang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum menandakan bahwa golput di Indonesia bukanlah suatu gerakan mayoritas yang terkonsolidasi dimana semua masyarakat memahami alasan ideologis untuk golput atau adanya kesepahaman bersama untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Meskipun Pemilu secara teknis telah berhasil dilaksanakan, namun partai-partai politik yang ada saat ini masih tetap belum mampu menjadi media representasi politik yang baik. Inilah salah satu masalah serius dimana representasi semua yang “seolah-olah” masih menjadi ciri dari sistem kepartaian yang oligarkis. Karena itu, representasi alternatif menjadi penting, bukan saja diwacanakan namun sekaligus dipromosikan untuk mengisi kekosongan dalam rangka memperbaiki model dan mekanisme perwakilan yang lebih representatif.

Kesimpulan

Hasil temuannya pertama, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap partai politik relatif rendah, ini tercermin pada kecenderungan meningkatkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan calon kepala daerah tingkat propinsi maupun tingkat kota di wilayah Surabaya. Kedua, sumber daya penghambat yang mempengaruhi tingginya masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah tingkat propinsi maupun tingkat kota dipengaruhi oleh tingginya tingkat korup-

si para aktor-aktor politik, sosial ekonomi, faktor sistem politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan sikap apatis masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah tingkat propinsi maupun tingkat kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel & Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Amal, Ichlasul, 1988, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Apter, David, 1988, *Pengantar Analisa Politik*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Asfar, Muhammad. 1996. Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Memilih, dalam *Jurnal Ilmu Politik* Vo. 6 .Nomor 16.
- Asfar, Muhammad. 1997. *Perilaku Politik Pemuda Perkotaan; Kasus Surabaya*, dalam analisis CSIS. Tahun XXVI, No 2.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2006, *Data Penelitian Kualitatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. Edisi revisi, *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- , 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. (Ed. Rev). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bisri, A. Zaini & Amirudin, 2005, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek, Sengketa Singkat Perjalanan Pilkada*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firmansyah, 2007, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Gaffar, Affan, 1992, *Javanese Voters; A Case Study of Election Under A Hegemonic Party System*. UGM Press; Yogyakarta.
- Haryanto, 1984, *Parpol; Suatu Pengantar Umum*. Liberty, Yogyakarta.

- Khoiruddin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi (Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahendra, A.A. Oka.2005, *Pilkada di Tengah Konflik Horisontal*. Milenium Publisher Jakarta.
- Mas'oed, Mochtar & Collins Mac Andrews, 1995, *Perbandingan Sistem Politik.*, UGM Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexy. J. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Metoda Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Interdisipliner*, CV. Dwiputra Pustaka Jaya, Jakarta.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama.
- Putra, Fadillah. 2001, *Devolusi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Aveross Press.
- Purwoko, Bambang.2005. *Isu-isu Strategis Pilkada Langsung : Ekspresi Kedaulatan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Dalam *Jurnal Swara Politika*, Laboratorium Ilmu Politik FISIP Unsoed.
- Saiful Mujani, "Deparpolisasi Pilkada?", *Media Indonesia*, 27 Juni 2005.
- Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Bhezt, 2010, *Perkembangan Partai Politik Dari Orde*". <http://www.abhest.com> 24 Februari 2011.
- Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014 Komisi Pemilihan Umum
- Read more at: <http://chengxplore.blogspot.com/2012/02/fungsi-partai-politik-dan-hambatannya.html> Di akses 25 Juli 2012
- <http://arahkiri2009.blogspot.com/2008/08/menguji-keseriusan-golput.html>. Diakses 28 Juli 2012
- <http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/6/partai-politik> Di akses 28 Juli 2012
- <http://www.abhest.co.cc/2010/02/perkembangan-partai-politik-dari-orde.html> \o "permanent link" 09.53 WIB). Di akses tanggal 14 Juli 2012